

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	896.778.077.293,94	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.175.048.729,15	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		925.953.126.023,09
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.010.130.985.293.82	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.799.691.715,85	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.018.930.677.009.67
Surplus/(defisit) setelah Perubahan	Rp.		(92.977.550.986.58)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	130.852.907.999,88	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.875.357.013,30)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		96.977.550.986,58
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	17.500.000.000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.500.000.000.00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		4.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.		92.977.550.986.58
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		0.00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Semula Rp. 28.936.200.000.00
  - 2) Bertambah Rp. 4.326.798.296.00
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 33.262.998.296.00
- b. Dana Perimbangan
  - 1) Semula Rp. 835.800.441.918.00
  - 2) Berkurang Rp. (40.746.131.689.00)
  - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 795.054.310.229.00
- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - 1) Semula Rp. 32.041.435.375.94
  - 2) Bertambah Rp. 65.594.382.122.15
  - Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 97.635.817.498.09

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
  - 1) Semula Rp. 7.612.600.000.00
  - 2) Bertambah Rp. 2.290.000.000.00
  - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.902.600.000.00
- b. Retribusi Daerah
  - 1) Semula Rp. 4.813.500.000.00
  - 2) Berkurang Rp. (73.500.000.00)
  - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 4.740.000.000.00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 1) Semula Rp. 5.000.000.000.00
  - 2) Berkurang Rp. (71.046.704.00)
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.928.953.296.00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  - 1) Semula Rp. 11.510.100.000.00
  - 2) Bertambah Rp. 2.181.345.000.00
  - Jumlah setelah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Perubahan Rp. 13.691.445.000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
  - 1) Semula Rp. 363.505.145.918.00
  - 2) Berkurang Rp. (40.746.131.689.00)
  - Jumlah setelah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Perubahan Rp. 322.759.014.229.00
- b. Dana Alokasi Umum
  - 1) Semula Rp. 455.996.416.000.00
  - 2) Bertambah Rp. 0.00
  - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 455.996.416.000.00

c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	16.298.880.000.00	
	2) Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	16.298.880.000.00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	0.00	
	2) Bertambah	Rp.	41.350.000.00	
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	41.350.000.00	

b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0.00	
	2) Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	0.00	

c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp.	22.405.099.498.09	
	2) Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	22.405.099.498.09	

d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp.	0.00	
	2) Bertambah	Rp.	64.189.368.000.00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	64.189.368.000.00	

e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1) Semula	Rp.	9.636.335.877.85	
	2) Bertambah	Rp.	1.363.664.122.15	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	11.000.000.000.00	

f.	Pendapatan Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp.	0.00	
	2) Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	0.00	

g.	Dana Tunjangan Kependidikan			
	1) Semula	Rp.	0.00	
	2) Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Dana Tunjangan Kependidikan setelah Perubahan	Rp.	0.00	

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp.	341.809.164.600.82	
	2) Bertambah	Rp.	65.056.515.852.70	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	406.865.680.453.52	

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	668.321.820.693.00	
2) Berkurang	Rp.	(56.256.824.136.85)	
Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		612.064.996.556.15

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	293.855.674.589.82	
2) Bertambah	Rp.	64.125.624.412.70	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		357.981.299.002.52
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0.00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		0.00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	3.501.532.100.00	
2) Bertambah	Rp.	85.000.000.00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		3.586.532.100.00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	7.006.135.075.00	
2) Bertambah	Rp.	1.045.891.440.00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		8.502.026.515.00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		0.00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	36.245.822.836.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		36.245.822.836.00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.200.000.000.00	
2) Berkurang	Rp.	(200.000.000.00)	
	Rp.		1.000.000.000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	48.713.011.400.00	
2) Berkurang	Rp.	(1.415.214.740,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		47.297.796.660.00

b.	Belanja Barang dan Jasa			
1)	Semula	Rp.	221.877.568.562.00	
2)	Berkurang	Rp.	(8.608.598.025.90)	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 213.268.970.536.10
c.	Belanja Modal			
1)	Semula	Rp.	397.731.240.731.00	
2)	Berkurang	Rp.	(46.233.011.370.95)	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 351.498.229.360.05

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	130.852.907.999.88	
2)	Berkurang	Rp.	(33.875.357.013.30)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 96.977.550.986.58
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	17.500.000.000.00	
2)	Berkurang	Rp.	(13.500.000.000.00)	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 4.000.000.000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :

a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :			
1)	Semula	Rp.	130.852.907.999.88	
2)	Berkurang	Rp.	(40.875.357.013.30)	
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 89.977.550.986.58
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1)	Semula	Rp.	0.00	
2)	Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0.00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp.	0.00	
2)	Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00
d.	Penerimaan Pinjaman sejumlah			
1)	Semula	Rp.	0.00	
2)	Bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0.00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1)	Semula	Rp.	0.00	
2)	Bertambah	Rp.	7.000.000.000.00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 7.000.000.000.00



f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0.00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	17.500.000.000.00	
2) Berkurang	Rp.	(13.500.000.000.00)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	4.000.000.000.00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	0.00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0.00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak.  
pada tanggal 1 September 2014  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 12

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor